

Dinas kehutanan  
Provinsi Maluku Utara



# RENCANA KERJA 2024



# KATA PENGANTAR

Dengan mengucapkan puji syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Kuasa atas rahmat dan Karunia-Nya, kami dapat menyelesaikan penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja PD) Dinas Kehutanan Provinsi Maluku Utara Tahun 2024.

Renja Perangkat Daerah Dinas Kehutanan Provinsi Maluku Utara Tahun 2024 merupakan dokumen berisikan program, kegiatan, lokasi, dan kelompok sasaran yang disertai indikator kinerja dan pendanaan sesuai dengan tugas dan fungsi dari Dinas Kehutanan selama periode 1 (satu) tahun. Penyusunan dokumen Renja ini mengacu kepada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang mengamanatkan bahwa dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah perlu disusun perencanaan pembangunan daerah sebagai satu kesatuan dalam sistem perencanaan pembangunan nasional.

Demikian Renja Perangkat Daerah tahun 2024 ini kami susun semoga dapat digunakan sebagai pedoman dalam pelaksanaan program dan kegiatan Dinas Kehutanan tahun 2024.

Sofifi, 16 November 2023

Kepala Dinas Kehutanan  
Provinsi Maluku Utara,



**H. M. Sukur Lila, S.Hut., M.Si**  
Pembina Muda  
NIP. 19690505 200112 1 005

# DAFTAR ISI

	i
<b>KATA PENGANTAR</b>	<b>i</b>
<b>DAFTAR ISI</b>	<b>ii</b>
<b>DAFTAR TABEL</b>	<b>iii</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN</b>	<b>1</b>
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Landasan Hukum	1
1.3. Maksud dan Tujuan	3
1.4. Sistematika Penulisan	3
<b>BAB II HASIL EVALUASI RENJA dinas kehutanan TAHUN 2022</b>	<b>5</b>
2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Dinas Kehutanan Tahun Lalu (2022) dan Capaian Renstra Dinas kehutanan	5
2.1.1 Capaian Indikator Kinerja Utama	5
2.1.2 Capaian Indikator Kinerja Program Prioritas	7
2.1.3 Faktor-faktor Penyebab Keberhasilan dan Kegagalan Pencapaian Kinerja Program	14
2.1.4 Perkiraan Capaian Tahun berjalan (Tahun 2023)	15
2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Dinas Kehutanan	15
2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Dinas Kehutanan	16
<b>BAB III TUJUAN DAN SASARAN DINAS KEHUTANAN</b>	<b>17</b>
3.1 Telaahan terhadap Kebijakan Nasional Tahun 2024	17
3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Dinas Kehutanan Tahun 2024	17
3.3 Program dan Kegiatan Renja Dinas Kehutanan Tahun 2024	18
<b>BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN Dinas kehutanan</b>	<b>20</b>
<b>BAB V PENUTUP</b>	<b>48</b>

# DAFTAR TABEL

Tabel 1. Penilaian capaian kinerja Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Kehutanan tahun 2022	7
Tabel 2. Realisasi IKTL Maluku Utara Tahun 2018–2022	7
Tabel 3. Program Prioritas dan Indikator Tahun 2022	8
Tabel 4. Capaian Kinerja Program Prioritas Tahun 2022	8
Tabel 5. Progres Dokumen RPHJP UPTD Lingkup Dinas Kehutanan	10
Tabel 6. Penurunan Volume Pencurian Hasil Hutan Kayu pada tahun 2018-2022	12
Tabel 7. Penyebab keberhasilan/kegagalan dalam pencapaian kinerja 2022	14
Tabel 8. Indeks Kualitas Tutupan Lahan (IKTL) 2020-2024	15
Tabel 9. Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2024 Dinas Kehutanan	21

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1. Latar Belakang**

Rencana Kerja Dinas Kehutanan yang selanjutnya disingkat Renja adalah dokumen perencanaan Dinas Kehutanan Provinsi Maluku Utara untuk periode 1 (satu) tahun. Renja ini memuat program, kegiatan, sub kegiatan, lokasi, dan kelompok sasaran yang disertai indikator kinerja dan pendanaan sesuai dengan tugas dan fungsi dari Dinas Kehutanan. Kualitas dokumen Renja sangat ditentukan oleh kualitas program dan kegiatan yang dilaksanakan, sehingga penyusunan Renja Dinas Kehutanan ditentukan oleh kemampuan SKPD dalam menyusun, mengorganisasi, mengimplementasi, mengendalikan, dan mengevaluasi capaian program dan kegiatan sesuai tugas pokok dan fungsi SKPD.

Berdasarkan Permendagri Nomor 86 Tahun 2017, tata cara penyusunan Renja terdiri dari Persiapan penyusunan, penyusunan rancangan awal Renja, penyusunan rancangan renja, perumusan rancangan akhir renja dan penetapan renja SKPD. Penyusunan Renja tahun 2024 berpedoman kepada Rencana Strategis Perubahan Dinas Kehutanan Provinsi Maluku Utara periode tahun 2022, Rencana Pembangunan Tahunan Daerah (RKPD) Provinsi Maluku Utara Tahun 2024, dan Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Maluku Utara periode 2020 – 2024.

Renja memuat prioritas Pembangunan Kehutanan disusun dengan maksud memberikan landasan dan pedoman bagi semua pelaku Pembangunan Kehutanan di Provinsi Maluku Utara. Bagi masing-masing Bidang dan UPTD di Lingkungan Dinas Kehutanan berkewajiban untuk mempedomani serta sebagai acuan dalam pelaksanaan kegiatan pembangunan kehutanan, sebagai manifestasi dari pelaksanaan tugas pokok dan fungsi pada masing-masing kewenangan yang diberikan, dengan demikian dokumen ini akan bermanfaat dalam rangka mewujudkan keterpaduan dan mensinergikan pembiayaan pembangunan kehutanan di Provinsi Maluku Utara.

### **1.2. Landasan Hukum**

Landasan hukum dalam menyusun Renja Dinas Kehutanan Provinsi Maluku Utara Tahun 2023 adalah sebagai berikut :

1. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
2. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Keuangan;

3. Undang-undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan;
4. Undang-undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan;
5. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
6. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan;
9. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana;
10. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana yang telah diubah menjadi Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2007;
13. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah
15. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susuna Perangkat Daerah Provinsi Maluku Utara;
16. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah.

19. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi Dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah.

### 1.3. Maksud dan Tujuan

Maksud dari penyusunan Renja Dinas Kehutanan Provinsi Maluku Utara Tahun 2024 adalah untuk memberikan gambaran mengenai kebijakan, program dan kegiatan yang sudah, sedang dan akan dilaksanakan oleh Dinas Kehutanan Provinsi Maluku Utara. Uraian program dan kegiatan dilengkapi dengan indikator kinerja dan pagu indikatif.

Tujuan dari penyusunan Renja Dinas Kehutanan Provinsi Maluku Utara Tahun 2023 adalah:

1. Menyediakan dokumen perencanaan Dinas Kehutanan untuk jangka 1 (satu) tahun, yaitu tahun 2024.
2. Menjamin tercapainya penggunaan sumber daya secara efektif, efisien, berkeadilan dan berkelanjutan dalam rangka pelaksanaan pembangunan tahunan daerah yang dilaksanakan oleh Dinas Kehutanan Provinsi Maluku Utara.

### 1.4. Sistematika Penulisan

Renja Dinas Kehutanan disusun dengan sistematika sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN: Berisi gambaran umum Penyusunan Rencana Kerja (Renja) Dinas Kehutanan Provinsi Maluku Utara.

- 1.1. Latar Belakang: Mengemukakan pengertian ringkas tentang Renja Dinas Kehutanan, Penyusunan Renja, keterkaitan antara Renja SKPD dengan dokumen perencanaan lainnya.
- 1.2. Landasan Hukum: Memuat tentang undang-undang, peraturan pemerintah, peraturan daerah dan ketentuan peraturan lainnya yang mengatur tentang kewenangan serta pedoman yang dijadikan acuan dalam penyusunan perencanaan dan penganggaran SKPD.
- 1.3. Maksud Dan Tujuan: Memuat penjelasan tentang maksud dan tujuan penyusunan Renja Dinas Kehutanan.
- 1.4. Sistematika Penyusunan Renja SKPD: Menguraikan pokok bahasan dalam penulisan Renja SKPD serta susunan dan garis besar isi dokumen.

## BAB II HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

- 2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu (2022) Dan Capaian Renstra Perangkat Daerah: Bab ini memuat kajian (review) terhadap hasil evaluasi pelaksanaan Renja Perangkat Daerah tahun lalu (tahun 2022) dan perkiraan capaian tahun berjalan (tahun 2023), mengacu pada APBD tahun berjalan yang sudah disahkan. Selanjutnya dikaitkan dengan capaian kinerja Indikator Kerja Utama dan Indikator Program Prioritas.
- 2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah: Berisikan kajian terhadap capaian kinerja Indikator Kerja Utama Dinas Kehutanan berdasarkan tujuan dan sasaran Dinas Kehutanan Provinsi Maluku Utara untuk periode Renstra 2020-2024 yaitu Indeks Kualitas Tutupan Lahan (IKTL).
- 2.3. Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas Dan Fungsi Perangkat Daerah: Berisikan uraian tugas dan fungsi dari Dinas Kehutanan sesuai peraturan yang berlaku, struktur organisasi yang berlaku, dan isu-isu yang dihadapi oleh Dinas Kehutanan untuk ditindaklanjuti dalam perumusan program dan kegiatan prioritas tahun yang direncanakan.

## BAB III TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

- 3.1. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional: berisikan kebijakan-kebijakan yang telah ditentukan oleh pemerintah pusat serta kebijakan nasional yang dapat didukung oleh Dinas Kehutanan.
- 3.2. Tujuan Dan Sasaran Renja Perangkat Daerah: Perumusan tujuan dan sasaran Renja tahun 2024 yang didasarkan atas RPJMPD provinsi Maluku Utara tahun 2020-2024 yang disesuaikan dengan arah kebijakan pembangunan daerah RKPD Provinsi Maluku Utara tahun 2024.
- 3.3 Program Dan Kegiatan: Berisikan penjabaran secara garis besar dari program dan kegiatan Dinas Kehutanan yang akan dilaksanakan pada tahun 2024.

## BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN

Uraian mengenai rekapitulasi program dan kegiatan, antara lain meliputi jenis program dan jenis kegiatan, Sifat penyebaran lokasi program dan kegiatan, Total kebutuhan dana/pagu indikatif yang dirinci menurut sumber pendanaannya.

## **BAB II**

### **HASIL EVALUASI RENJA DINAS KEHUTANAN TAHUN 2022**

#### **2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Dinas Kehutanan Tahun Lalu (2022) dan Capaian Renstra Dinas kehutanan**

Rencana Kerja Dinas Kehutanan Provinsi Maluku Utara adalah penjabaran perencanaan tahunan dan Rencana Strategis Dinas Kehutanan. Tercapai atau tidaknya pelaksanaan program dan kegiatan yang telah disusun dapat dilihat dari Laporan Kinerja (LKj) Pemerintah. Terkait dengan hal tersebut Rencana Kerja (Renja) Dinas Kehutanan Provinsi Maluku Utara menyajikan dasar pengukuran kinerja kegiatan dan pengukuran kinerja sasaran dari hasil yang telah diraih atau dilaksanakan pada tahun 2022 dan perkiraan target tahun 2023.

Pengukuran Kinerja kegiatan dan pengukuran kinerja sasaran melalui tahapan Penetapan Indikator Kinerja merupakan syarat untuk pengukuran kinerja. Kriteria pengukuran yang dipakai adalah target kinerja yang ditetapkan. Target kinerja menunjukkan komitmen dari pimpinan dan seluruh pegawai untuk mencapai hasil yang diinginkan dari setiap program dan kegiatan yang dilakukan. Pengukuran kinerja dilakukan pada Indikator Kerja Utama (IKU) dan Indikator Program Prioritas.

Evaluasi terhadap pencapaian setiap indikator kinerja kegiatan bertujuan untuk memberikan penjelasan lebih lanjut tentang hal-hal yang mendukung keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan suatu kegiatan. Evaluasi juga bertujuan untuk mengetahui pencapaian realisasi, kemajuan dan kendala yang dijumpai dalam rangka pencapaian misi, agar dapat dinilai dan dipelajari guna perbaikan pelaksanaan program/ kegiatan di masa datang.

##### **2.1.1 Capaian Indikator Kinerja Utama**

Sesuai dengan Perjanjian Kinerja Dinas Kehutanan, Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Kehutanan Provinsi Maluku Utara yaitu Indeks Kualitas Tutupan Lahan (IKTL). Indeks ini diperoleh dari Indikator dalam RPJMD Provinsi Maluku Utara yaitu Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH). Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) merupakan nilai yang mencerminkan perubahan kondisi lingkungan. Nilai tersebut diukur dari 4 indikator yaitu Indeks Kualitas Air (IKA), Indeks Kualitas Udara (IKU), Indeks Kualitas Lahan (IKL) dan Indeks Kualitas Air Laut (IKAL). (1) Indeks Kualitas Air (IKA) diukur berdasarkan parameter DO (Oksigen Terlarut), Fecal Coliform, COD, BOD, pH, Total Fosfat (T-P), Nitrat (NO<sub>3</sub>-N), dan TSS. (2) Indeks Kualitas Udara (IKU) diukur berdasarkan parameter NO<sub>2</sub>, dan SO<sub>2</sub>. (3) Indeks Kualitas Lahan (IKL) diukur berdasarkan Indeks Kualitas Tutupan Lahan (IKTL) dan Indeks Kualitas Ekosistem Gambut (IKEG), yang mempresentasikan kondisi kualitas lahan yang dipengaruhi oleh tutupan lahan,

sementara untuk ekosistem gambut, mempertimbangkan dampak kebakaran dan keberadaan sekat kanal pada ekosistem lahan gambut sebagai faktor koreksi kualitas tutupan lahan, (4) Indeks Kualitas Air Laut (IKAL) diukur dengan parameter TSS, DO (oksigen terlarut), minyak dan lemak, amonia total, dan fosfat (sebagai orto fosfat).

Indikator Indeks Kualitas Tutupan Lahan (IKTL) merupakan nilai yang menggambarkan kualitas tutupan lahan yang dihitung dari kondisi tutupan hutan dan tutupan vegetasi non hutan. Kualitas tutupan lahan yang dihitung adalah tutupan yang mencerminkan kondisi vegetasi yang menutupi suatu bidang lahan dalam wilayah provinsi. Kualitas tutupan lahan yang baik ditunjukkan dengan proporsi penutupan lahan yang dikategorikan sebagai hutan menutupi area (coverage area) mendekati 84,3% dari luas wilayah administrasinya atau dengan rentang nilai indeks 90 – 100. Peningkatan nilai IKTL mencerminkan upaya pemerintah pusat maupun pemerintah daerah dalam menjaga laju deforestasi dan menerapkan rehabilitasi pada setiap provinsi di Indonesia.

Berdasarkan PermenLHK No. 27 tahun 2021 tentang IKLH, perhitungan Indeks Kualitas Lingkungan Hidup menggunakan rumus sebagai berikut:

$$IKTL = 100 - ((84,3 - (TL \times 100)) \times \frac{50}{54,3})$$

Keterangan:

IKTL : Indeks Kualitas Tutupan Lahan

TL : Tutupan Lahan

TL dihitung dengan rumus:  $TL = \frac{LTL}{LW}$  dimana,

LTL : Luas Tutupan Lahan

LW : Luas Wilayah Kabupaten/Kota atau Provinsi

Atau rumus TL yang lebih rinci:

$$TL = \frac{(Luas\ tutupan\ hutan) + ((belukar\ kawasan\ hutan + belukar\ di\ APL + luas\ RTH) \times 0,6) + (luas\ areal\ rehabilitasi\ hutan \times 0,6)}{Luas\ Wilayah\ kab./kota\ atau\ Provinsi}$$

Berdasarkan Laporan Kinerja 2022 yang dirilis oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Realisasi Indeks Kualitas Tutupan Lahan (IKTL) tahun 2022 di Maluku Utara dapat di lihat pada tabel berikut:

**Tabel 1.** Penilaian capaian kinerja Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Kehutanan tahun 2022

NO.	INDIKATOR KINERJA	TARGET 2022	REALISASI 2022	CAPAIAN KINERJA (%)	PREDIKAT
1	Indeks Kualitas Tutupan Lahan (IKTL)	86,39	86,58	100	Memuaskan

Sumber: Renstra Dishut Perubahan 2022, Laporan Kinerja KLHK 2022

Dari tabel diatas terlihat Capaian kinerja dari Indikator Kinerja Utama Dinas Kehutanan berupa IKTL tahun 2022 melebihi target yang telah ditetapkan. Realisasi IKTL pada 5 tahun terakhir dilihat pada tabel berikut:

**Tabel 2.** Realisasi IKTL Maluku Utara Tahun 2018–2022

NO.	INDIKATOR KINERJA	2018	2019	2020	2021	2022
1	Indeks Kualitas Tutupan Lahan (IKTL)	86,54	86,60	86,18	86,58	86,58

Sumber: Laporan Kinerja KLHK 2022

### 2.1.2 Capaian Indikator Kinerja Program Prioritas

Dalam mencapai keberhasilan kinerja Indikator Kinerja Utama (IKU), Dinas Kehutanan Provinsi Maluku Utara melaksanakan Program dan Kegiatan yang dibiayai oleh Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2022 dengan total pagu sebesar Rp. 49.478.953.967. Uraian dari program tersebut adalah sebagai berikut:

**Tabel 3.** Program Prioritas dan Indikator Tahun 2022

NO.	PROGRAM	INDIKATOR
1	Program Pengelolaan Hutan	Persentase KPH memiliki Dokumen Perencanaan
		Penurunan Volume Hasil Hutan Kayu
		Jumlah Titik Api Terdeteksi
		Luasan lahan kritis diluar kawasan hutan negara yang direhabilitasi (Ha)
2	Program Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya	Jumlah Kawasan Penyangga Ekosistem Penting yang dikelola
3	Program Pendidikan dan Pelatihan, Penyuluhan dan Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Kehutanan	Peningkatan akses legal kepada pengelolaan hutan melalui perhutanan sosial
		Jumlah KTH Yang dibina
4	Program Pengelolaan Daerah Aliran Sungai (DAS)	Luas Rehabilitasi DAS

Capaian Kinerja berdasarkan program-program prioritas Dinas Kehutanan Provinsi Maluku Utara tahun 2022 diukur berdasarkan capaian target indikator yang telah ditentukan. Secara lengkap disajikan pada tabel berikut :

**Tabel 4.** Capaian Kinerja Program Prioritas Tahun 2022

NO.	INDIKATOR KINERJA	SATUAN INDIKATOR	TARGET	REALISASI	CAPAIAN KINERJA (%)	PREDIKAT
1	Persentase KPH memiliki Dokumen Perencanaan	%	87,75	100	≥ 100	Memuaskan
2	Penurunan Volume Hasil Hutan Kayu	M <sup>3</sup>	250	20	≥ 100	Memuaskan
3	Jumlah Titik Api Terdeteksi	Titik	20	187	< 55	Kurang

4	Luasan Lahan Kritis diluar Kawasan Hutan Negara yang Direhabilitasi	Ha	200	1126	$\geq 100$	Memuaskan
5	Jumlah Kawasan Ekosistem Penting yang dikelola	Kawasan	1	0	0	Kurang
6	Peningkatan Akses Legal Kepada Masyarakat dalam Pengelolaan Hutan melalui Perhutanan Sosial	KTH	124	212	$\geq 100$	Memuaskan
7	Jumlah Kelompok Tani Hutan (KTH) yang Dibina	KTH	160	164	$\geq 100$	Memuaskan
8	Luas Rehabilitasi DAS	Ha	200	1860	$\geq 100$	Memuaskan

Penjelasan pencapaian kinerja indikator program prioritas Dinas Kehutanan Maluku Utara tahun 2022 sebagai berikut:

#### 1. Persentase KPH Memiliki Dokumen Perencanaan

Dokumen Perencanaan KPH yang dimaksud adalah Dokumen Rencana Pengelolaan Hutan Jangka Panjang (RPHJP). Dinas Kehutanan Provinsi Maluku Utara memiliki 16 unit KPH berdasarkan Keputusan Menteri Kehutanan Nomor SK. 73/Menhut-II/2010 tanggal 8 Februari 2010.

Secara kumulatif, dokumen RPHJP yang telah tersusun sebanyak 16 dokumen, sehingga pencapaian kinerja sebesar 100%. Capaian ini tergolong memuaskan, mengingat RPHJP ini merupakan dokumen yang penting bagi KPH dalam melaksanakan tugas dan fungsinya. KPH yang belum memiliki RPHJP akan memiliki keterbatasan dalam mengelola dan mengembangkan KPH atau dengan kata lain unit pengelola hutan tingkat tapak belum dapat beroperasi. Rincian KPH yang telah dan yang belum memiliki RPHJP sebagai berikut:

**Tabel 5.** Progres Dokumen RPHJP UPTD Lingkup Dinas Kehutanan

No	KPH/UNIT	Luas (ha)	RPHJP
1	KPH Pulau Morotai		
	1. Unit I KPHL Pulau Morotai	155.306	SK.159/MENLHK-KPHL/PKPHL/DAS.3/1/2019 Tanggal 14 Januari 2019
2	KPH Halmahera Utara		
	2. Unit II KPHL Tiabo	106.244	SK.10750/MENLHK-KPHL/PKPHL/DAS.3/12/2019 Tanggal 31 Desember 2019
3	KPH Halmahera Barat		
	3 Unit III KPHL Sasado Bidadari	176.663	SK.8721/MENLHK-KPHL/PKPHL/DAS.3/12/2018 Tanggal 20 Desember 2018
4	KPH Halmahera Timur		
	4. Unit IV KPHP Watileo	201.844	Dalam Proses Pengesahan
	5. Unit V KPHP Talawi	81.370	SK.4780/MENLHK-KPHP/PKPHP/HPL.0/8/2020 Tanggal 14 Agustus 2020
	6. Unit VIII KPHP Wasile Maba	37.269	Dalam Proses Pengesahan
5	KPH Halmahera Tengah		
	7. Unit VI KPHL Ake Kobe	71.276	SK.4274/MENLHK-KPHL/PKPHL/DAS.3/5/2021 Tanggal 31 Mei 2021
	8. Unit VII KPHP Damuli	95.880	SK.4763/MENLHK-KPHP/PKPHP/HPL.0/8/2020 Tanggal 12 Agustus 2020
6	KPH Tidore Kepulauan		
	9. Unit IX KPHP Oba	16.325	SK.5485/MENLHK-KPHP/PKPHP/HPL.0/10/2017 Tanggal 18 Oktober 2017
	10. Unit X KPHP Gunung Sinopa	44.577	SK.7578/MENLHK-II/Reg.4-1/2014 Tanggal 17 Desember 2014
7	KPH Ternate – Tidore		
	11. Unit XI KPHL Ternate – Tidore	9.705	SK.6400/MENLHK-KPHL/PKPHL/DAS.3/7/2019 Tanggal 25 Juli 2019

8	KPH Halmahera Selatan		
	12. Unit XII KPHP Gane	175.671	SK.5486/MENLHK-KPHP/PKPHP/HPL.0/10/2017 Tanggal 18 Oktober 2017
	13. Unit XIII KPHP Pulau Bacan	134.726	SK.7580/MENLHK-II/Reg.4-1/2014 Tanggal 17 Desember 2014
	14. Unit XIV KPHP Pulau Obi	173.618	Dalam Proses Pengesahan
9	KPH Kepulauan Sula		
	15. Unit XV KPHP Wai Todantaha	95.622	SK.4762/MENLHK-KPHP/PKPHP/HPL.0/8/2020 Tanggal 12 Agustus 2020
10	KPH Pulau Taliabu		
	16. Unit XVI KPHP Wai Samada	192.328	Dalam Proses Pengesahan

Realisasi kepemilikan dokumen RPHJP dari tahun ke tahun semakin meningkat. Berdasarkan tabel diatas, 4 Unit KPH dengan status “dalam proses pengesahan” telah selesai menyusun dokumen RPHJP tetapi dikarenakan pengurusan dokumen ini memiliki proses yang panjang dan memerlukan waktu yang cukup lama, sehingga masih dalam proses pengesahan di KLHK.

## 2. Penurunan Volume Hasil Hutan Kayu

Penurunan volume hasil kayu adalah salah satu kegiatan dari subbidang perlindungan dan pengamanan hutan yang melacak adanya aksi pencurian hasil hutan kayu (*Illegal Logging*) dari dalam kawasan hutan oleh oknum-oknum tertentu. Dinas Kehutanan Provinsi Maluku Utara diberi kewenangan dalam upaya perlindungan dan pengamanan kawasan hutan lindung dan hutan produksi, melalui kegiatan pencegahan seperti patroli pengamanan hutan, sosialisasi perlindungan hutan dan kegiatan penindakan seperti penegakkan hukum yang bekerja sama dengan aparat penegak hukum. Upaya tersebut diharapkan dapat menurunkan angka tindak pidana pencurian hasil hutan kayu (*illegal logging*) dari kawasan hutan setiap tahunnya.

Pada tahun 2022, penangkapan hasil hutan kayu illegal sudah sangat menurun yaitu hanya sebesar 20 m<sup>3</sup>. Angka ini tergolong kecil sehingga dapat diindikasikan bahwa kegiatan pencurian hasil hutan oleh masyarakat atau oknum-oknum tertentu sudah berkurang. Realisasi penurunan volume pencurian hasil hutan dari tahun ke tahun semakin menurun (Tabel 7). Hal ini merupakan cerminan dari peningkatan kesadaran masyarakat akan pentingnya kelestarian hutan sehingga masyarakat ikut serta menjaga hutan dengan melakukan pemanfaatan hasil hutan bukan kayu dan atau jasa lingkungan.

**Tabel 6.** Penurunan Volume Pencurian Hasil Hutan Kayu pada tahun 2018-2022

NO.	INDIKATOR KINERJA	2018	2019	2020	2021	2022
1	Penurunan volume pencurian hasil hutan kayu (m <sup>3</sup> )	266,92	253,57	101,37	94,50	20

### 3. Jumlah titik api terdeteksi

Jumlah titik api terdeteksi merupakan kegiatan dari Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran Hutan dan Lahan. Kebakaran hutan dapat terjadi karena faktor alami dan faktor buatan. Faktor buatan bisa disebabkan oleh ulah manusia yang sengaja atau pun tidak sengaja yang menyebabkan kebakaran hutan.

Maluku Utara secara nasional memang tidak termasuk provinsi yang rawan kebakaran hutan dan lahan. Pencegahan dan penanggulangan kebakaran hutan dan lahan di Provinsi Maluku Utara belum maksimal disebabkan terbatasnya sumber daya manusia, sarana dan prasarana serta anggaran. Selama tahun 2022, terpantau sebanyak 187 titik api dari 20 titik api yang ditargetkan. Data titik api ini diperoleh dari website sistem monitoring kebakaran hutan dan lahan dari KLHK yaitu <https://sipongi.menlhk.go.id/> menggunakan data matrik titik panas TERRA/AQUA (LAPAN).

### 4. Luasan Lahan Kritis diluar Kawasan Hutan Negara yang Direhabilitasi

Luasan lahan kritis di luar kawasan hutan negara yang direhabilitasi merupakan indikator kegiatan rehabilitasi yang meliputi Perencanaan, Pelaksanaan, Monitoring dan Evaluasi hutan dan lahan diluar Kawasan hutan negara. Kegiatan ini bertujuan untuk meningkatkan penutupan lahan oleh vegetasi pohon. Kegiatan ini merupakan kegiatan prioritas yang secara berkelanjutan dilaksanakan oleh Dinas Kehutanan Provinsi Maluku Utara.

Total realisasi rehabilitasi lahan kritis diluar Kawasan hutan tahun 2022 seluas 1126 Ha. Realisasi ini sudah jauh melebihi target tahun seluas 200, sehingga kinerja untuk rehabilitasi ini dikategorikan memuaskan.

### 5. Jumlah Kawasan Penyangga Ekosistem Penting yang dikelola

Pengelolaan kawasan penyangga ekosistem penting merupakan kegiatan dari program konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya. Pada tahun 2022, kegiatan ini tidak terlaksana karena waktu pelaksanaan di akhir tahun bertepatan dengan kegiatan lain.

## **6. Peningkatan akses legal kepada masyarakat dalam pengelolaan hutan melalui Perhutanan Sosial**

Program Perhutanan Sosial merupakan salah satu kebijakan Pemerintah Pusat yang mempunyai tujuan untuk meningkatkan peran masyarakat sekitar hutan dalam pengelolaan hutan berkelanjutan. Perhutanan Sosial memberikan akses kepada masyarakat untuk berusaha di dalam kawasan hutan agar masyarakat di sekitar hutan bisa meningkatkan kesejahteraan hidup, dengan tetap menjaga kelestarian dan fungsi kawasan hutan sebagaimana mestinya.

Pengelolaan Perhutanan Sosial merupakan upaya kolaborasi dan sinergitas dari berbagai pihak diantaranya kementerian, lembaga, pemerintah daerah, maupun lembaga swadaya masyarakat, serta berbagai pihak lainnya yang terkait. Dinas kehutanan memiliki peran pendampingan kepada masyarakat dalam bentuk kegiatan sosialisasi PS di tingkat tapak, fasilitasi penyusunan Rencana Kerja Perhutanan Sosial (RKPS), dan pembentukan Kelompok Usaha PS (KUPS) pada pemegang ijin PS.

Pada tahun 2022, secara kumulatif terbentuknya Kelompok Tani Hutan (KTH) yang memiliki ijin Perhutanan Sosial sebanyak 212 KTH dari target tahunannya sebanyak 124 KTH. Peningkatan pemegang ijin PS ini berasal dari 6 kota/kabupaten yaitu Halmahera Barat, Halmahera Utara, Pulau Morotai, Kepulauan Sula, Kota Ternate, dan Kota Tidore Kepulauan. Penambahan 88 kelompok pemegang ijin PS ini cukup banyak, mengingat PS merupakan program prioritas nasional yang diamanatkan oleh presiden Joko Widodo untuk segera dilaksanakan untuk mencapai target seluas 12,7 Juta Ha pada tahun 2030.

## **7. Jumlah Kelompok Tani Hutan (KTH) yang Dibina**

Kelompok Tani Hutan (KTH) yang Dibina merupakan salah satu indikator dari Program Pendidikan Dan Pelatihan, Penyuluhan Dan Pemberdayaan Masyarakat Di Bidang Kehutanan.

Pembangunan sektor kehutanan terus berupaya mewujudkan pengelolaan hutan yang lestari untuk kesejahteraan masyarakat. Salah satu upaya untuk tetap melestarikan hutan adalah dengan melakukan pemberdayaan masyarakat sekitar hutan melalui pembentukan KTH. Keterlibatan aktif masyarakat dalam pembangunan kehutanan diharapkan dapat meningkatkan keberhasilan pembangunan sektor kehutanan dan mewujudkan hutan yang lestari masyarakat sejahtera.

Jumlah KTH yang diberikan pembinaan pada tahun 2022 secara kumulatif sebanyak 164 KTH. Angka ini melebihi dari target yang ditentukan yaitu 160 KTH. Bentuk pembinaan yang dilakukan adalah bimbingan teknis pengoperasian Alat Ekonomi Produktif (AEP).

## 8. Luas Rehabilitasi DAS

Rehabilitasi Daerah Aliran Sungai (DAS) merupakan kegiatan dari program Pengelolaan Daerah Aliran Sungai (DAS) dengan tugas Dinas Kehutanan untuk mengoordinasikan pelaksanaan rehab DAS kepada pihak-pihak terkait.

Kegiatan rehabilitasi DAS salah satunya dilaksanakan oleh pemegang Persetujuan Penggunaan Kawasan Hutan untuk usaha pertambangan. Berdasarkan data dari BPDAS Akemalamo tahun 2022, luas rehabilitasi DAS yang telah dilakukan seluas 1.860 Ha. Pihak yang melakukan rehabilitasi DAS tersebut yaitu Pemegang Izin PPKH yang terdiri dari PT. Adidaya Tangguh, PT. Fajar Bhakti Lintas Nusantara, PT. Trimegah Bangun Persada, PT. Haltim Mining, dan PT. Mineral Trobos.

### 2.1.3 Faktor-faktor Penyebab Keberhasilan dan Kegagalan Pencapaian Kinerja Program

Dibalik Pencapaian target kinerja tahun 2022 terdapat faktor-faktor yang mempengaruhi, baik faktor positif atau yang mendukung keberhasilan, maupun faktor negatif atau faktor yang menjadi penyebab kegagalan/terhambat dalam pencapaian kinerja. Analisis penyebab keberhasilan dan kegagalan serta alternatif solusi yang telah dilakukan adalah sebagai berikut:

**Tabel 7.** Penyebab keberhasilan/kegagalan dalam pencapaian kinerja 2022

Penyebab keberhasilan	Penyebab kegagalan	Alternatif Solusi
<b>Secara umum</b>		
Dukungan Dana Tranfer dari pemerintah pusat khususnya DBH DR	Dukungan dana APBD belum mencukupi untuk mendukung semua kegiatan yang di rencanakan	<ul style="list-style-type: none"><li>• Koordinasi dengan pihak terkait untuk mensinergiskan program kegiatan</li><li>• Mengoptimalkan sumber anggaran yang ada</li></ul>
Kolaborasi dari berbagai stakeholder	Stakeholder masih bekerja sendiri pada jalurnya masing-masing	Melakukan koordinasi untuk menyamakan tujuan
<b>Indikator Kinerja Utama (Indeks Kualitas Tutupan Lahan (IKTL))</b>		
Dukungan dan kolaborasi dari intansi terkait lainnya, baik daerah maupun pusat	Kurangnya dukungan Anggaran APBD	Peningkatan Anggaran baik APBD

	Kurangnya SDM fungsional penyuluh dan belum tersedianya SDM Polisi Kehutanan (Polhut) dan sarana pendukungnya	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Penerimaan ASN baru sesuai dengan kebutuhan dinas</li> <li>• Mengoptimalkan personil dinas dan dana yang ada untuk kegiatan perlindungan dan pengamanan hutan</li> </ul>
	Luas kawasan hutan Maluku Utara yang mencapai 2,5 jt Ha dan geografis daerah kepulauan.	Penguatan fungsi KPH untuk perlindungan hutan, pemberdayaan masyarakat dan rehabilitasi hutan

#### 2.1.4 Perkiraan Capaian Tahun berjalan (Tahun 2023)

Pada tahun 2023, Indikator Kinerja Utama (IKU) dan Indikator Kinerja Program Prioritas Dinas Kehutanan masih sama dengan tahun 2022. Berdasarkan dokumen RENSTRA perubahan Dishut 2020-2024 dan/atau P-RPJMD Provinsi Maluku Utara, target nilai IKU tahun 2023 dalam bentuk Indeks Kualitas Tutupan Lahan (IKTL) sebesar 86,82.

**Tabel 8.** Indeks Kualitas Tutupan Lahan (IKTL) 2020-2024

No.	Indikator	Target Capaian Setiap Tahun				
		2020	2021	2022	2023	2024
1.	IKTL	86,18	86,17	86,39	86,60	86,82

Sedangkan Program prioritas Dinas Kehutanan tahun 2023 terdiri dari 1 program penunjang, 4 program prioritas, dan beberapa kegiatan hasil dari uraian program-program tersebut. Kegiatan-kegiatan tersebut sedang dalam pelaksanaan dan akan direkap hasil realisasinya pada setiap triwulan dan dilaporkan pada akhir tahun/awal tahun dalam dokumen Laporan Kinerja (LKj) Dinas Kehutanan TA 2023.

## 2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Dinas Kehutanan

Kajian terhadap capaian kinerja pelayanan Dinas Kehutanan berdasarkan Indikator Kinerja Utama (IKU). Seperti yang telah dijelaskan pada capaian kinerja IKU pada subbab sebelumnya (subbab 2.1.1), IKU Maluku Utara tahun 2022 dalam bentuk IKTL sebesar 86,58. Angka ini melebihi target yang telah ditentukan pada P-RPJMD dan/atau Renstra perubahan 2022 yaitu 86,39. Pencapaian ini tergolong

sangat baik karena dengan program dan/atau kegiatan yang telah dilaksanakan oleh dinas kehutanan dibantu dengan pihak lembaga/kementerian terkait mampu mempertahankan bahkan meningkatkan luas tutupan lahan di Maluku Utara di era aktifnya pembangunan, pemukiman dan investasi di bidang tambang.

### **2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Dinas Kehutanan**

Isu-isu penting di Dinas Kehutanan disajikan dalam uraian permasalahan dan hambatan dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi perangkat daerah. Hambatan dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi diantaranya adalah

1. Dukungan dana APBD yang belum mencukupi untuk mendukung semua kegiatan dinas kehutanan yang di rencanakan,
2. Kurangnya SDM fungsional penyuluh dan belum tersedianya SDM Polisi Kehutanan (Polhut) serta sarana pendukungnya,
3. Luas kawasan hutan Maluku Utara yang mencapai 2,5 jt Ha dan geografis daerah kepulauan,
4. Kurang tersedianya data informasi kehutanan yang terintegrasi sesuai dengan kebutuhan para pihak,
5. Belum optimalnya pengelolaan, pembangunan, dan penyelenggaraan KPH,
6. Belum optimal pemanfaatan hasil hutan bukan kayu,
7. Belum optimal pengawasan terhadap pelaku usaha pemanfaatan hasil hutan,
8. Belum optimalnya pemberdayaan masyarakat melalui perhutanan sosial,
9. Kurangnya dukungan terhadap peningkatan investasi di daerah,
10. Terjadinya gangguan keamanan hutan dan tertibnya peredaran hasil hutan,
11. Pemanasan global dan perubahan iklim.

## **BAB III**

# **TUJUAN DAN SASARAN DINAS KEHUTANAN**

### **3.1 Telaahan terhadap Kebijakan Nasional Tahun 2024**

Berdasarkan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Nasional (MURSENBANGNAS) Rencana Kerja Pemerintah (RKP) tahun 2024 yang diselenggarakan oleh Kementerian PPN/Bappenas di Jakarta Convention Center pada Bulan Mei 2023 lalu, kepala Bappenas Suharso Monoarfa menyampaikan tema dari RKP 2024 adalah “Mempercepat Transformasi Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan. RKP 2024 ini merupakan RKP tahun ke-5 dalam konteks Rencana Pembangunan Lima Tahunan yaitu RPJMN 2020-2024. RKP 2024 ini memiliki pedoman 8 arah kebijakan, diantaranya yaitu:

1. Pengurangan Kemiskinan dan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem;
2. Peningkatan Kualitas Pelayanan Pendidikan dan Kesehatan;
3. Penguatan Daya Saing Usaha;
4. Revitalisasi Industri dan Penguatan Riset Terapan;
5. Pembangunan Rendah Karbon dan Transisi Energi;
6. Percepatan Pembangunan Infrastruktur Dasar dan Konektivitas;
7. Percepatan Pembangunan Ibu Kota Nusantara; dan
8. Pelaksanaan Pemilu 2024.

### **3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Dinas Kehutanan Tahun 2024**

Pada tingkat daerah, musrenbang dalam rangka penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Maluku Utara tahun 2024 dilaksanakan pada bulan April lalu dihadiri secara langsung oleh Gubernur Maluku Utara KH. Abdul Gani Kasuba. Pada acara tersebut disampaikan bahwa tema dari Rencana Kerja Pemerintah Provinsi (RKPD) Maluku Utara tahun 2024 adalah “Mewujudkan Penciptaan Daya Saing dan kesejahteraan Secara Berkelanjutan”. Selain itu, disampaikan juga prioritas pembangunan daerah provinsi Maluku Utara tahun 2024 diantaranya yaitu:

1. Meningkatkan kualitas dan daya saing SDM dan Penanggulangan Kemiskinan,
2. Memajukan Kebudayaan Daerah dan Memperkuat harmoni sosial,
3. Memperkuat infrastruktur wilayah dan menjamin pelayanan dasar,
4. Mengembangkan wilayah dan menjamin pemerataan,
5. Memperkuat kualitas transformasi struktural dan pertumbuhan ekonomi,

6. Membangun lingkungan hidup dan ketahanan bencana, dan
7. Mengakselerasi reformasi birokrasi dan inovasi daerah.

### 3.3 Program dan Kegiatan Renja Dinas Kehutanan Tahun 2024

Rencana Kerja Dinas Kehutanan Provinsi Maluku Utara tahun 2024 merencanakan 5 Program Prioritas (1 Program Penunjang dan 4 Program Prioritas) dan 20 Kegiatan yang dijabarkan sebagai berikut:

#### A. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi

1. Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
2. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
3. Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah
4. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
5. Administrasi Umum Perangkat Daerah
6. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
7. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
8. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

#### B. Program Pengelolaan Hutan

1. Pengelolaan Rencana Tata Hutan Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) Kewenangan Provinsi
2. Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan kecuali pada Kesatuan Pengelolaan Hutan Konservasi (KPHK)
3. Pemanfaatan Hutan di Kawasan Hutan Produksi dan Hutan Lindung
4. Pelaksanaan Rehabilitasi di Luar Kawasan Hutan Negara
5. Pelaksanaan Perlindungan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi
6. Pelaksanaan Pengolahan Hasil Hutan Bukan Kayu (HHBK)
7. Pelaksanaan Pengelolaan Hasil Hutan Kayu dengan Kapasitas Produksi <6000 m<sup>3</sup>/Tahun
8. Perbenihan Tanaman Hutan

**C. Program Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya**

1. Perlindungan Tumbuhan dan Satwa Liar yang Tidak Dilindungi dan/atau Tidak Masuk dalam Lampiran (Appendix) CITES (*Convension On International Trade InEndangered Species*) untuk Kewenangan Daerah Provinsi.
2. Pengelolaan Kawasan Bernilai Ekosistem Penting, Daerah Penyangga Kawasan Suaka Alam dan Kawasan Pelestarian Alam.

**D. Program Pendidikan dan Pelatihan, Penyuluhan dan Pemberdayaan Masyarakat Di Bidang Kehutanan**

1. Pelaksanaan Penyuluhan Kehutanan Provinsi dan Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Kehutanan.

**E. Program Pengelolaan Daerah Aliran Sungai (DAS)**

1. Pelaksanaan Pengelolaan DAS Lintas Daerah Kabupaten/Kota dan dalam Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi.

## **BAB IV**

# **RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DINAS KEHUTANAN**

Program Dinas Kehutanan Provinsi Maluku Utara yang telah ditetapkan dalam RPJMD merupakan program prioritas untuk mensukseskan pembangunan oleh Gubernur dan Wakil Gubernur terpilih Periode 2020-2024. Rencana program prioritas beserta indikator keluaran program dan pagu per Perangkat Daerah sebagaimana tercantum dalam RPJMD, selanjutnya dijabarkan oleh Perangkat Daerah ke dalam rencana kegiatan untuk setiap program prioritas tersebut. Pemilihan kegiatan untuk masing-masing program prioritas ini didasarkan atas strategi dan kebijakan jangka menengah Perangkat Daerah.

Berdasarkan rencana program dan kegiatan yang telah disusun, total anggaran APBD yang dibutuhkan oleh Dinas Kehutanan pada tahun anggaran 2024 yaitu sebesar Rp. 36.313.844.000,- dan 10 UPTD KPH Lingkup Dinas Kehutanan sebesar Rp. 3.580.000.000,-. Rencana, program, kegiatan, dan pendanaan secara lengkap dapat dilihat pada Tabel 9.

**Tabel 9.** Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2024 Dinas Kehutanan

Kode	Urusan/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator	Rencana Tahun 2024			Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2025		Penanggung Jawab	Ket.	
			Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp)	Sumber Dana		Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp)			
(1)	(2)	(3)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)		
3 28	<b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEHUTANAN</b>			36.313.844.000				39.945.228.400			
3 28 01	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI</b>	Cakupan implementasi Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi pada perangkat daerah (persen)	100	Persen	28.700.844.000			100	Persen	31.570.928.400	
3 28 01 101	<b>Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b>	Jumlah Dokumen Perencanaan/Anggaran/Laporan Kinerja Tersedia	5	Dokumen	42.000.000			5	Dokumen	46.200.000	
28 01 101 01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	3	Dokumen	20.000.000	DAU		3	Dokumen	22.000.000	Sekretariat
3 28 01 101 02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1	Dokumen	20.000.000	DAU		1	Dokumen	22.000.000	Sekretariat
3 28 01 101 06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1	Laporan	2.000.000	DAU		1	Laporan	2.200.000	Sekretariat
3 28 01 102	<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>	<b>Persentase pelaksanaan administrasi keuangan</b>	100	Persen	27.353.844.000			100	Persen	30.089.228.400	
3 28 01 102 01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	12	Bulan	27.313.844.000	DAU		12	Bulan	30.045.228.400	Sekretariat
3 28 01 102 05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1	Laporan	20.000.000	DAU		1	Laporan	22.000.000	Sekretariat
3 28 01 102 06	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan	1	Dokumen	20.000.000	DAU		1	Dokumen	22.000.000	Sekretariat
3 28 01 103	<b>Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah</b>	<b>Tertibnya Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah</b>	12	Bulan	40.000.000			12	Bulan	44.000.000	
3 28 01 103 01	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	1	Dokumen	15.000.000	DAU		1	Dokumen	16.500.000	Sekretariat
3 28 01 103 04	Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	1	Laporan	25.000.000	DAU		1	Laporan	27.500.000	Sekretariat

Kode	Urusan/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator	Rencana Tahun 2024			Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2025			Penanggung Jawab	Ket.	
			Target Capaian		Kebutuhan Dana (Rp)		Sumber Dana	Target Capaian				Kebutuhan Dana (Rp)
<b>3 28 01 105</b>	<b>Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>	<b>Persentase Pemenuhan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>	<b>100</b>	<b>Persen</b>	<b>100.000.000</b>		<b>100</b>	<b>Persen</b>	<b>110.000.000</b>			
3 28 01 105 04	Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	1	Dokumen	20.000.000	DAU	1	Dokumen	22.000.000	Sekretariat		
3 28 01 105 05	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	1	Dokumen	25.000.000	DAU	1	Dokumen	27.500.000	Sekretariat		
3 28 01 105 09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	2	Orang	25.000.000	DAU	2	Orang	27.500.000	Sekretariat		
3 28 01 105 10	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	20	Orang	30.000.000	DAU	20	Orang	33.000.000	Sekretariat		
<b>3 28 01 106</b>	<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	<b>Persentase Pemenuhan Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	<b>100</b>	<b>Persen</b>	<b>630.000.000</b>		<b>100</b>	<b>Persen</b>	<b>693.000.000</b>			
3 28 01 106 01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1	Paket	5.000.000	DAU	1	Paket	5.500.000	Sekretariat		
3 28 01 106 02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1	Paket	50.000.000	DAU	1	Paket	55.000.000	Sekretariat		
3 28 01 106 07	Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	1	Paket	50.000.000	DAU	1	Paket	55.000.000	Sekretariat		
3 28 01 106 09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1	Laporan	500.000.000	DAU	1	Laporan	550.000.000	Sekretariat		
3 28 01 106 11	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	1	Dokumen	25.000.000	DAU	1	Dokumen	27.500.000	Sekretariat		
<b>3 28 01 107</b>	<b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>	<b>Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Tahun berjalan</b>	<b>2</b>	<b>Unit</b>	<b>60.000.000</b>		<b>2</b>	<b>Unit</b>	<b>66.000.000</b>			
3 28 01 107 02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	1	Unit	30.000.000	DAU	1	Unit	33.000.000	Sekretariat		
3 28 01 107 05	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	1	Paket	30.000.000	DAU	1	Paket	33.000.000	Sekretariat		

Kode	Urusan/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator	Rencana Tahun 2024			Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2025			Penanggung Jawab	Ket.
			Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp)	Sumber Dana		Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp)			
3 28 01 108	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Pesentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100	Persen	320.000.000		100	Persen	352.000.000		
3 28 01 108 02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1	Laporan	300.000.000	DAU	1	Laporan	330.000.000	Sekretariat	
3 28 01 108 04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1	Laporan	20.000.000	DAU	1	Laporan	22.000.000	Sekretariat	
3 28 01 109	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Bulan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	12	Bulan	155.000.000		12	Bulan	170.500.000		
3 28 01 109 02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	10	Unit	100.000.000	DAU	10	Unit	110.000.000	Sekretariat	
3 28 01 109 06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	2	Unit	5.000.000	DAU	2	Unit	5.500.000	Sekretariat	
3 28 01 109 09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1	Unit	50.000.000	DAU	1	Unit	55.000.000	Sekretariat	
3 28 03	PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN	Persentase KPH memiliki Dokumen Perencanaan	100	%	2.233.000.000		100	%	2.456.300.000		
		Penurunan volume pencurian hasil hutan kayu (M3)	87,6	M3			87,6	M3			
		Penurunan jumlah titik api terdeteksi	33	titik			33	titik			
		Luasan lahan kritis di luar kawasan hutan negara yang direhabilitasi (Ha)	1331	Ha			1331	Ha			
3 28 03 101	Pengelolaan Rencana Tata Hutan Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) Kewenangan Provinsi	Jumlah Pemenuhan Operasional Pengelolaan Hutan oleh KPH	50	Persen	650.000.000		50	Persen	715.000.000		
3 28 03 101 01	Penyusunan Rancang Bangun Tata Hutan Wilayah Kesatuan Pengelolaan Hutan	Jumlah Rancang Bangun Tata Hutan Wilayah Kesatuan Pengelolaan Hutan yang Disusun	1	Dokumen	50.000.000	DAU, DBH DR	1	Dokumen	55.000.000	PPKH	
3 28 03 101 02	Pembagian Blok/Petak Pengelolaan Hutan Kesatuan Pengelolaan Hutan	Jumlah Unit Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi/Lidung (KPHP/L) yang Telah Dilakukan Pembagian Blok	1	Unit	50.000.000	DAU, DBH DR	1	Unit	55.000.000	PPKH	

Kode	Urusan/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator	Rencana Tahun 2024			Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2025			Penanggung Jawab	Ket.					
			Target Capaian		Kebutuhan Dana (Rp)		Sumber Dana	Target Capaian				Kebutuhan Dana (Rp)				
3	28	03	101	03	Penyediaan dan Pemeliharaan Sarana Prasarana Operasionalisasi KPH	Jumlah Sarana Prasarana Operasionalisasi Resor dan Kantor Resor Kesatuan Pengelolaan Hutan yang Terbangun	10	Unit	50.000.000	DAU, DBH DR		10	Unit	55.000.000	PPKH	
3	28	03	101	04	Koordinasi dan Sinkronisasi Usulan Perubahan Fungsi dan Peruntukan Hutan	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Usulan Perubahan Peruntukkan dan Fungsi Kawasan Hutan untuk Wilayah Provinsi	1	Dokumen	500.000.000	DAU, DBH DR		1	Dokumen	550.000.000	PPKH	
3	28	03	102		<b>Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan kecuali pada Kesatuan Pengelolaan Hutan Konservasi (KPHK)</b>	<b>Jumlah Dokumen Perencanaan KPH (RPHJPD)</b>	<b>16</b>	<b>Dokumen</b>	<b>75.000.000</b>			<b>16</b>	<b>Dokumen</b>	<b>82.500.000</b>		
3	28	03	102	01	Penyusunan Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan	Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan yang Tersusun	16	Dokumen	75.000.000	DAU, DBH DR		16	Dokumen	82.500.000	PPKH	
3	28	03	103		<b>Pemanfaatan Hutan di Kawasan Hutan Produksi dan Hutan Lindung</b>	<b>Jumlah Pemegang Persetujuan yang di Kendalikan</b>	<b>10</b>	<b>Unit</b>	<b>130.000.000</b>			<b>10</b>	<b>UM</b>	<b>143.000.000</b>		
3	28	03	103	01	Penyediaan Data dan Informasi Wilayah Usaha di Kawasan Hutan Produksi	Jumlah Data dan Informasi Terkait Luas Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan di Kawasan Hutan Produksi dalam 1 (Satu) Provinsi Secara Berkala	1	Dokumen	40.000.000	DAU, DBH DR		1	Dokumen	44.000.000	PPKH, PPHH	
3	28	03	103	03	Pelayanan Perizinan Usaha/Kerjasama Melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik, di Kawasan Hutan Produksi dan Hutan Lindung pada Blok Pemanfaatan Kecuali pada Wilayah Perum Perhutan	Jumlah Dokumen Analisis dalam Rangka Pemberian Pertimbangan Teknis Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan (PBPH)	1	Dokumen	50.000.000	DAU, DBH DR		1	Dokumen	55.000.000	PPKH, PPHH	
3	28	03	103	04	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Izin Usaha atau Kerjasama Pemanfaatan di Kawasan Hutan Produksi	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Sinkronisasi Pembinaan, Pengendalian, dan Pengawasan PBPH Di Kawasan Hutan Produksi	1	Dokumen	5.000.000	DAU, DBH DR		1	Dokumen	5.500.000	PPKH, PPHH	
3	28	03	103	06	Penilaian Rencana Pengelolaan di Kawasan Hutan Produksi	Jumlah Dokumen Rencana Kerja Tahunan Pemanfaatan Hutan Produksi yang Disahkan	1	Dokumen	35.000.000	DAU, DBH DR		1	Dokumen	38.500.000	PPKH	
3	28	03	104		<b>Pelaksanaan Rehabilitasi di Luar Kawasan Hutan Negara</b>	<b>Luas lahan kritis yang direhabilitasi</b>	<b>50</b>	<b>Ha</b>	<b>698.000.000</b>			<b>50</b>	<b>Ha</b>	<b>767.800.000</b>		
3	28	03	104	01	Penyusunan Rencana Tahunan Rehabilitasi Lahan (RTnRL)	Jumlah Dokumen Rencana Tahunan Rehabilitasi Lahan yang Disusun (RTnRL)	1	Dokumen	50.000.000	DAU, DBH DR		1	Dokumen	55.000.000	PKSDH	
3	28	03	104	02	Pembangunan Hutan Rakyat di Luar Kawasan Hutan Negara	Luas Hutan Rakyat yang Dibangun di Luar Kawasan Hutan Negara	50	Ha	643.000.000	DAU, DBH DR		50	Ha	707.300.000	PKSDH	

Kode	Urusan/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator	Rencana Tahun 2024			Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2025		Penanggung Jawab	Ket.		
			Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp)	Sumber Dana		Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp)				
3 28 03 104 08	Pembinaan dan/atau Pengawasan dalam rangka Pengembangan Rehabilitasi Lahan	Jumlah Laporan Pembinaan dan/atau Pengawasan dalam Rangka Pengembangan Rehabilitasi Lahan	1	Laporan	5.000.000	DAU, DBH DR		1	Laporan	5.500.000	PKSDH	
3 28 03 105	<b>Pelaksanaan Perlindungan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi</b>	<b>Jumlah luas pengamanan hutan (illegal logging dan perambahan)</b>	<b>2000</b>	<b>Ha</b>	<b>320.000.000</b>			<b>2000</b>	<b>Ha</b>	<b>352.000.000</b>		
3 28 03 105 01	Pencegahan dan Pembatasan Kerusakan Hutan	Luas Hutan yang Dilakukan Patroli Pengamanan Hutan	1000	Ha	100.000.000	DAU, DBH DR		1000	Ha	110.000.000	PKSDH	
3 28 03 105 02	Pencegahan dan Pembatasan Kerusakan Kawasan Hutan	Luas Kawasan Hutan yang Dilakukan Patroli Pengamanan Hutan	1000	Ha	100.000.000	DAU, DBH DR		1000	Ha	110.000.000	PKSDH	
3 28 03 105 03	Pencegahan dan Pembatasan Kerusakan Hasil Hutan	Jumlah Operasi Pencegahan dan Pembatasan Kerusakan Hasil Hutan	1	Operasi	40.000.000	DAU, DBH DR		1	Operasi	44.000.000	PKSDH	
3 28 03 105 04	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Perlindungan Hutan	Jumlah Laporan Pertemuan/Rapat Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Perlindungan Hutan	1	Dokumen	30.000.000	DAU, DBH DR		1	Dokumen	33.000.000	PKSDH	
3 28 03 105 05	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pencegahan/Penganggulangan Kebakaran Hutan dan Lahan	Jumlah Laporan Patroli /Sosialisasi yang Dilaksanakan Dalam Satu Tahun	1	Laporan	50.000.000	DAU, DBH DR		1	Laporan	55.000.000	PKSDH	
3 28 03 106	<b>Pelaksanaan Pengolahan Hasil Hutan Bukan Kayu (HHBK)</b>	<b>Jumlah Perizinan Berusaha Pengolahan Hasil Hutan Bukan Kayu yang Terfasilitasi</b>	<b>2</b>	<b>Unit Managemen</b>	<b>150.000.000</b>			<b>2</b>	<b>Unit Managemen</b>	<b>165.000.000</b>		
3 28 03 106 02	Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Penerbitan Izin Usaha Industri Primer Hasil Hutan Bukan Kayu (IUIPHHBK) melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	Jumlah Permohonan PBPHH Bukan Kayu Skala Kecil dan Menengah yang Dilayani	1	Unit Managemen	50.000.000	DAU, DBH DR		1	Unit Managemen	55.000.000	PPHH	
3 28 03 106 03	Pembudidayaan Hasil Hutan Bukan Kayu dengan tidak Mengurangi Fungsi Pokoknya	Jumlah Unit Managemen PBPH HHBK Skala Kecil dan Menengah Beroperasi	1	Unit Managemen	50.000.000	DAU, DBH DR		1	Unit Managemen	55.000.000	PPHH	
3 28 03 106 04	Pengawasan Perizinan Pengolahan Hasil Hutan Bukan Kayu	Jumlah Unit Managemen PBPHH HHBK Skala Kecil dan Menengah yang Memiliki Hak Akses SI-RPBBPHH	1	Unit Managemen	50.000.000	DAU, DBH DR		1	Unit Managemen	55.000.000	PPHH	
3 28 03 107	<b>Pelaksanaan Pengolahan Hasil Hutan Kayu dengan Kapasitas Produksi &lt;6000 m3/Tahun</b>	<b>Jumlah Perizinan Berusaha Pengolahan Hasil Hutan Kayu yang Terfasilitasi</b>	<b>2</b>	<b>Unit Managemen</b>	<b>150.000.000</b>			<b>2</b>	<b>Unit Managemen</b>	<b>165.000.000</b>		
3 28 03 107 01	Rencana Pengolahan Hasil Hutan Kayu dengan Kapasitas Produksi <6000 m3/Tahun	Jumlah Unit Managemen yang Melaksanakan Tertib Pelaporan RKOPHH untuk Pemegang PBPHH (Kayu dan HHBK) Skala Usaha Kecil dan Menengah	1	Unit Managemen	50.000.000	DAU, DBH DR		1	Unit Managemen	55.000.000	PPHH	

Kode					Urusan/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator	Rencana Tahun 2024			Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2025		Penanggung Jawab	Ket.		
							Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp)	Sumber Dana		Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp)				
3	28	03	107	02	Pembinaan dan Pelaksanaan Pengolahan Hasil Hutan Kayu dengan Kapasitas Produksi <6000 m3/Tahun	Jumlah Dokumen Pelaksanaan Pembinaan, Pengendalian dan Pengawasan PBPHH (Kayu dan/atau HHBK) untuk Skala Usaha Kecil dan Menengah yang menjadi Kewenangan Provinsi	1	Dokumen	50.000.000	DAU, DBH DR		1	Dokumen	55.000.000	PPHH	
3	28	03	107	03	Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Izin Usaha Industri Primer Hasil Hutan Kayu (IUIPHHK) dengan Kapasitas Produksi <6000 m3 /Ta melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	Jumlah Permohonan PBPHH Kayu Skala Kecil dan Menengah yang Dilayani	1	Unit Managemen	50.000.000	DAU, DBH DR		1	Unit Managemen	55.000.000	PPHH	
3	28	03	109		<b>Perbenihan Tanaman Hutan</b>	<b>Jumlah Pengadah benih/bibit yang bersertifikat</b>	3	Unit	60.000.000			3	Unit	66.000.000		
3	28	03	109	01	Penetapan Pengadaan Benih dan Pengedar Benih dan/atau Bibit Terdaftar	Jumlah Penerbitan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko (Perorangan dan Badan Usaha Non Perhutani) Kegiatan Usaha Pengadaan dan Pengedaran Benih, Pengadaan dan Pengedaran Bibit, Serta Pengadaan dan Pengedaran Benih dan Bibit Dalam Provinsi	1	Unit Usaha	30.000.000	DAU, DBH DR		1	Unit Usaha	33.000.000	PPHH	
3	28	03	109	05	Pengawasan Peredaran Benih dan/atau Bibit	Jumlah Data (Asal Usul, Jenis Mutu) Benih Atau Bibit yang Beredar	1	Laporan	30.000.000	DAU, DBH DR		1	Laporan	33.000.000	PPHH	
3	28	04			<b>PROGRAM KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM HAYATI DAN EKOSISTEMNYA</b>	<b>Rasio luas kawasan lindung untuk menjaga kelestarian keanekaragaman hayati terhadap total luas kawasan hutan</b>	31,9	Persen	100.000.000			31,9	Ha	110.000.000		
3	28	04	102		<b>Perlindungan Tumbuhan dan Satwa Liar yang Tidak Dilindungi dan/atau Tidak Masuk dalam Lampiran (Appendix ) CITES (Convension On International Trade In Endangered Species) untuk Kewenangan Daerah Provinsi</b>	<b>Jumlah Laporan Pengendalian dan Pengawasan Tumbuhan dan Satwa Liar (TSL) yang Tidak Dilindungi dan/atau Tidak Masuk dalam lampiran CITES</b>	1	Laporan	30.000.000			1	Laporan	33.000.000		
3	28	04	102	01	Pengendalian dan Pengawasan Tumbuhan dan Satwa Liar yang tidak Dilindungi dan/atau Tidak Masuk dalam Lampiran CITES	Jumlah Laporan Pengendalian dan Pengawasan Tumbuhan dan Satwa Liar (TSL) yang Tidak Dilindungi dan/atau Tidak Masuk dalam lampiran CITES	1	Laporan	30.000.000	DAU, DBH DR		1	Laporan	33.000.000	PKSDH	
3	28	04	103		<b>Pengelolaan Kawasan Bernilai Ekosistem Penting, Daerah Penyangga Kawasan Suaka Alam dan Kawasan Pelestarian Alam</b>	<b>Luas Daerah Penyangga di Kawasan Bernilai Ekosistem Penting yang Dikelola</b>	2	Ha	70.000.000			2	Ha	77.000.000		

Kode	Urusan/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2025			Penanggung Jawab	Ket.				
			Target Capaian		Kebutuhan Dana (Rp)	Sumber Dana		Target Capaian		Kebutuhan Dana (Rp)						
3	28	04	103	05	Penguatan Kapasitas dan Pemberdayaan Masyarakat di Kawasan Bernilai Ekosistem Penting Kewenangan Daerah Provinsi	Jumlah Kelompok/Masyarakat yang Diberdayakan	16	Orang	30.000.000	DAU, DBH DR		16	Orang	33.000.000	PKSDH	
3	28	04	103	06	Pengelolaan Daerah Penyangga di Kawasan Bernilai Ekosistem Penting Kewenangan Daerah Provinsi	Luas Daerah Penyangga di Kawasan Bernilai Ekosistem Penting yang Dikelola Provinsi	2	Ha	40.000.000	DAU, DBH DR		2	Ha	44.000.000	PKSDH	
3	28	05			<b>PROGRAM PENDIDIKAN DAN PELATIHAN, PENYULUHAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI BIDANG KEHUTANAN</b>	Jumlah Kelompok Tani Hutan (KTH) yang diberikan akses legal (kumulatif)	164	KTH	5.180.000.000			164	KTH	5.698.000.000		
				Jumlah Kelompok Tani Hutan (KTH) yang dibina (kumulatif)		141	KTH	141		KTH						
3	28	05	101		<b>Pelaksanaan Penyuluhan Kehutanan Provinsi dan Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Kehutanan</b>	Jumlah KTH Yang dibina	75	KTH	5.180.000.000			75	KTH	5.698.000.000		
3	28	05	101	01	Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi Penyuluh Kehutanan dan SDM Bidang Kehutanan	Jumlah Penyuluh Kehutanan yang Dilakukan Peningkatan Kapasitas	2	Orang	30.000.000	DAU, DBH DR		2	Orang	33.000.000	PPM	
3	28	05	101	02	Penguatan dan Pendampingan Kelembagaan Kelompok Tani Hutan	Jumlah Kelompok Tani Hutan yang Mandiri yang Mengikuti Penguatan dan Pendampingan Kelembagaan	2	Kelompok	50.000.000	DAU, DBH DR		2	Kelompok	55.000.000	PPM	
3	28	05	101	03	Penyiapan dan Pengembangan Perhutanan Sosial	Luas Kawasan yang Disiapkan untuk Perhutanan Sosial	5000	Ha	5.100.000.000	DAU, DBH DR		5000	Ha	5.610.000.000	PPM	
3	28	06			<b>PROGRAM PENGELOLAAN DAERAH ALIRAN SUNGAI (DAS)</b>	Cakupan implementasi Pengelolaan Daerah Aliran Sungai (DAS)	100	Persen	100.000.000			100	Dokumen	110.000.000		
3	28	06	101		<b>Pelaksanaan Pengelolaan DAS Lintas Daerah Kabupaten/Kota dan dalam Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi</b>	Jumlah Dokumen Pengelolaan DAS	1	Dokumen	100.000.000			1	Dokumen	110.000.000		
3	28	06	101	01	Penyusunan dan Penetapan Rencana Pengelolaan DAS	Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan DAS yang Ditetapkan	1	Dokumen	50.000.000	DAU		1	Dokumen	55.000.000	PKSDH	
3	28	06	101	02	Optimalisasi Fungsi dan Daya Dukung Wilayah DAS	Jumlah Dokumen Sinkronisasi dan Koordinasi Optimalisasi DAS	1	Dokumen	25.000.000	DAU		1	Dokumen	27.500.000	PKSDH	
3	28	06	101	05	Pengembangan Kelembagaan Pengelolaan DAS	Jumlah Lembaga yang Dibentuk dan Dikembangkan dalam Forum Pengelolaan DAS	1	Lembaga	25.000.000	DAU		1	Lembaga	27.500.000	PKSDH	

OPD : DINAS KEHUTANAN  
 UNIT : KPH TERNATE TIDORE

Kode	Urusan/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator	Lokasi	Rencana Tahun 2024			Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2025		Keterangan
				Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp)	Sumber Dana		Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
3 28	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEHUTANAN				650.000.000				715.000.000	
3 28 01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI				125.000.000				137.500.000	
3 28 01 106	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Administrasi Umum Perangkat Daerah			70.000.000				77.000.000	
3 28 01 106 02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Kota Ternate	1 Paket	15.000.000	DAU, DBH DR		1 Paket	16.500.000	
3 28 01 106 07	Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	Kota Ternate	1 Paket	10.000.000	DAU, DBH DR		1 Paket	11.000.000	
3 28 01 106 09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kota Ternate, Kota Tidore Kepulauan	1 Laporan	45.000.000	DAU, DBH DR		1 Laporan	49.500.000	
3 28 01 108	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			10.000.000				11.000.000	
3 28 01 108 02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Kota Ternate	1 Laporan	10.000.000	DAU, DBH DR		1 Laporan	11.000.000	
3 28 01 109	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Bulan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			45.000.000				49.500.000	
3 28 01 109 02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Kota Ternate	2 Unit	43.000.000	DAU, DBH DR		2 Unit	47.300.000	
3 28 01 109 06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara		3 Unit	2.000.000	DAU, DBH DR		3 Unit	2.200.000	



3	28	05	101		Pelaksanaan Penyuluhan Kehutanan Provinsi dan Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Kehutanan	Jumlah KTH dan penyuluh yang difasilitasi				350.000.000					385.000.000	
3	28	05	101	02	Penguatan dan Pendampingan Kelembagaan Kelompok Tani Hutan	Jumlah Kelompok Tani Hutan yang Mandiri yang Mengikuti Penguatan dan Pendampingan Kelembagaan	Kota Ternate	3	Kelompok	350.000.000	DAU, DBH DR		3	Kelompok	385.000.000	

OPD : DINAS KEHUTANAN

UNIT : KPH TIDORE KEPULAUAN

Kode	Urusan/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator	Lokasi	Rencana Tahun 2024			Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2025		Keterangan						
				Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp)	Sumber Dana		Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp)							
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)						
3	28				675.000.000				742.500.000							
3	28	01			178.700.000				196.570.000							
3	28	01	105		18.000.000				19.800.000							
3	28	01	105	09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	BDK Makassar	2	Orang	18.000.000	DAU, DBH DR		2	Orang	19.800.000	
3	28	01	106		88.800.000				97.680.000							
3	28	01	106	07	Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	Kota Tikep (Ktr KPH)	1	Paket	13.000.000	DAU, DBH DR		1	Paket	14.300.000	
3	28	01	106	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kota Tikep, Luar Kota Dlm Provinsi dan DKI Jakarta	7	Laporan	75.800.000	DAU, DBH DR		7	Laporan	83.380.000	
3	28	01	108		8.900.000				9.790.000							

3	28	01	108	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Kota Tikep (Ktr KPH)	1	Laporan	8.900.000	DAU, DBH DR	1	Laporan	9.790.000	
3	28	01	109		<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>Jumlah Bulan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>				<b>63.000.000</b>				<b>69.300.000</b>	
3	28	01	109	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Kota Tikep	10	Unit	48.500.000	DAU, DBH DR	10	Unit	53.350.000	
3	28	01	109	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Kota Tikep (Ktr KPH)	1	Unit	14.500.000	DAU, DBH DR	1	Unit	15.950.000	
3	28	03			<b>PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN</b>					<b>447.100.000</b>				<b>491.810.000</b>	
3	28	03	104		<b>Pelaksanaan Rehabilitasi di Luar Kawasan Hutan Negara</b>	<b>Luas lahan kritis yang direhabilitasi</b>				<b>147.600.000</b>				<b>162.360.000</b>	
3	28	03	104	02	Pembangunan Hutan Rakyat di Luar Kawasan Hutan Negara	Luas Hutan Rakyat yang Dibangun di Luar Kawasan Hutan Negara	Kec. Oba Kota Tikep	5	Ha	147.600.000	DAU, DBH DR	5	Ha	162.360.000	
3	28	03	105		<b>Pelaksanaan Perlindungan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi</b>	<b>Jumlah luas pengamanan hutan (illegal logging dan perambahan)</b>				<b>259.500.000</b>				<b>285.450.000</b>	
3	28	03	105	01	Pencegahan dan Pembatasan Kerusakan Hutan	Luas Hutan yang Dilakukan Patroli Pengamanan Hutan	Kec. Oba Utara dan Oba Tengah	2.500	Ha	27.500.000	DAU, DBH DR	2.500	Ha	30.250.000	
3	28	03	105	02	Pencegahan dan Pembatasan Kerusakan Kawasan Hutan	Luas Kawasan Hutan yang Dilakukan Patroli Pengamanan Hutan	Kec. Oba dan Oba Selatan	2.000	Ha	28.000.000	DAU, DBH DR	2.000	Ha	30.800.000	
3	28	03	105	03	Pencegahan dan Pembatasan Kerusakan Hasil Hutan	Jumlah Operasi Pencegahan dan Pembatasan Kerusakan Hasil Hutan	Kec. Oba Selatan dan Oba Utara	2	Operasi	29.000.000	DAU, DBH DR	2	Operasi	31.900.000	
3	28	03	105	04	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Perlindungan Hutan	Jumlah Laporan Pertemuan/Rapat Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Perlindungan Hutan	Kota Tikep, Kab Halteng dan DKI Jakarta	1	Dokumen	175.000.000	DAU, DBH DR	1	Dokumen	192.500.000	

3	28	03	106		Pelaksanaan Pengolahan Hasil Hutan Bukan Kayu (HHBK)	Jumlah Perizinan Berusaha Pengolahan Hasil Hutan Bukan Kayu yang Terfasilitasi				14.000.000					15.400.000	
3	28	03	106	04	Pengawasan Perizinan Pengolahan Hasil Hutan Bukan Kayu	Jumlah Unit Manajemen PBPHH HHBK Skala Kecil dan Menengah yang Memiliki Hak Akses SI-RPBBPHH	Kec. Oba Utara	3	Unit Manajemen	14.000.000	DAU, DBH DR		3	Unit Manajemen	15.400.000	
3	28	03	107		Pelaksanaan Pengolahan Hasil Hutan Kayu dengan Kapasitas Produksi <6000 m3/Tahun	Jumlah Perizinan Berusaha Pengolahan Hasil Hutan Kayu yang Terfasilitasi				26.000.000					28.600.000	
3	28	03	107	02	Pembinaan dan Pelaksanaan Pengolahan Hasil Hutan Kayu dengan Kapasitas Produksi <6000 m3/Tahun	Jumlah Dokumen Pelaksanaan Pembinaan, Pengendalian dan Pengawasan PBPHH (Kayu dan/atau HHBK) untuk Skala Usaha Kecil dan Menengah yang menjadi Kewenangan Provinsi	Kec. Oba Tengah dan Kec. Oba	1	Dokumen	26.000.000	DAU, DBH DR		1	Dokumen	28.600.000	
3	28	05			PROGRAM PENDIDIKAN DAN PELATIHAN, PENYULUHAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI BIDANG KEHUTANAN					49.200.000					54.120.000	
3	28	05	101		Pelaksanaan Penyuluhan Kehutanan Provinsi dan Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Kehutanan	Jumlah KTH Yang dibina				49.200.000					54.120.000	
3	28	05	101	01	Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi Penyuluh Kehutanan dan SDM Bidang Kehutanan	Jumlah Penyuluh Kehutanan yang Dilakukan Peningkatan Kapasitas	BDK Makassar	5	Orang	49.200.000	DAU, DBH DR		5	Orang	54.120.000	

OPD : DINAS KEHUTANAN  
UNIT : KPH HALMAHERA BARAT

Kode	Urusan/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator	Lokasi	Rencana Tahun 2024			Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2025		Keterangan
				Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp)	Sumber Dana		Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
3	28				275.000.000				258.500.000	
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEHUTANAN										



3	28	03			<b>PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN</b>					40.000.000					44.000.000	
3	28	03	105		<b>Pelaksanaan Perlindungan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi</b>	<b>Jumlah luas pengamanan hutan (illegal logging dan perambahan)</b>				40.000.000					44.000.000	
3	28	03	105	01	Pencegahan dan Pembatasan Kerusakan Hutan	Luas Hutan yang Dilakukan Patroli Pengamanan Hutan	Kab. Halmahera Barat	2.000	Ha	15.000.000	DAU, DBH DR		2.000	Ha	16.500.000	
3	28	03	105	02	Pencegahan dan Pembatasan Kerusakan Kawasan Hutan	Luas Kawasan Hutan yang Dilakukan Patroli Pengamanan Hutan	Kab. Halmahera Barat	1.500	Ha	15.000.000	DAU, DBH DR		1.500	Ha	16.500.000	
3	28	03	105	03	Pencegahan dan Pembatasan Kerusakan Hasil Hutan	Jumlah Operasi Pencegahan dan Pembatasan Kerusakan Hasil Hutan	Kab. Halmahera Barat	1	Operasi	10.000.000	DAU, DBH DR		1	Operasi	11.000.000	

**OPD : DINAS KEHUTANAN**  
**UNIT : KPH HALMAHERA UTARA**

Kode	Urusan/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator	Lokasi	Rencana Tahun 2024			Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2025		Keterangan						
				Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp)	Sumber Dana		Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp)							
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)						
3	28								275.000.000							
3	28	01							197.670.000							
3	28	01	106						109.461.000							
3	28	01	106	07	Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	Kab. Halmahera Utara	1	Paket	19.350.000	DAU, DBH DR		1	Paket	21.285.000	
3	28	01	106	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kab. Halmahera Utara	1	Laporan	80.160.000	DAU, DBH DR		1	Laporan	88.176.000	



OPD : DINAS KEHUTANAN  
 UNIT : KPH HALMAHERA SELATAN

Kode	Urusan/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator	Lokasi	Rencana Tahun 2024			Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2025		Keterangan
				Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp)	Sumber Dana		Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
3 28	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEHUTANAN				575.000.000				632.500.000	
3 28 01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI				150.000.000				165.000.000	
3 28 01 105	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah			25.000.000				27.500.000	
3 28 01 105 09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	Kab. Halmahera Tengah	2 Orang	25.000.000	DAU, DBH DR		2 Orang	27.500.000	
3 28 01 106	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Administrasi Umum Perangkat Daerah			100.000.000				110.000.000	
3 28 01 106 02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Kab. Halmahera Tengah	1 Paket	10.000.000	DAU, DBH DR		1 Paket	11.000.000	
3 28 01 106 07	Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	Kab. Halmahera Tengah	1 Paket	15.000.000	DAU, DBH DR		1 Paket	16.500.000	
3 28 01 106 09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kab. Halmahera Tengah	1 Laporan	75.000.000	DAU, DBH DR		1 Laporan	82.500.000	
3 28 01 107	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah			10.000.000				11.000.000	
3 28 01 107 05	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Kab. Halmahera Tengah	1 Paket	10.000.000	DAU, DBH DR		1 Paket	11.000.000	
3 28 01 108	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			15.000.000				16.500.000	
3 28 01 108 02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Kab. Halmahera Tengah	1 Laporan	15.000.000	DAU, DBH DR		1 Laporan	16.500.000	



OPD : DINAS KEHUTANAN  
 UNIT : KPH HALMAHERA TENGAH

Kode	Urusan/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator	Lokasi	Rencana Tahun 2024			Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2025		Keterangan					
				Target Capian	Kebutuhan Dana (Rp)	Sumber Dana		Target Capian	Kebutuhan Dana (Rp)						
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)					
3	28				250.000.000				269.170.000						
3	28	01			185.000.000				197.670.000						
3	28	01	105		10.000.000				11.000.000						
3	28	01	105	09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	BDK Makassar	1	Orang	10.000.000	DAU, DBH DR	1	Orang	11.000.000	
3	28	01	106			74.700.000			82.170.000						
3	28	01	106	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Kab. Halmahera Tengah	1	Paket	17.500.000	DAU, DBH DR	1	Paket	19.250.000	
3	28	01	106	07	Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	Kab. Halmahera Tengah	1	Paket	7.200.000	DAU, DBH DR	1	Paket	7.920.000	
3	28	01	106	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kab. Halmahera Tengah	1	Laporan	50.000.000	DAU, DBH DR	1	Laporan	55.000.000	
3	28	01	107			15.300.000			11.000.000						
3	28	01	107	05	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Kab. Halmahera Tengah	1	Paket	10.000.000	DAU, DBH DR	1	Paket	11.000.000	
3	28	01	107	10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Kab. Halmahera Tengah	1	Unit	5.300.000	DAU, DBH DR	1	Unit	5.830.000	





3	28	01	109		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Bulan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				60.000.000					66.000.000	
3	28	01	109	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Kab. Halmahera Timur	3	Unit	45.000.000	DAU, DBH DR		3	Unit	49.500.000	
3	28	01	109	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Kab. Halmahera Timur	5	Unit	5.000.000	DAU, DBH DR		5	Unit	5.500.000	
3	28	01	109	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Kab. Halmahera Timur	1	Unit	10.000.000	DAU, DBH DR		1	Unit	11.000.000	
3	28	03			<b>PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN</b>					35.000.000					38.500.000	
3	28	03	105		Pelaksanaan Perlindungan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi	Jumlah luas pengamanan hutan (illegal logging dan perambahan)				35.000.000					38.500.000	
3	28	03	105	02	Pencegahan dan Pembatasan Kerusakan Kawasan Hutan	Luas Kawasan Hutan yang Dilakukan Patroli Pengamanan Hutan	Kab. Halmahera Timur	2.000	Ha	20.000.000	DAU, DBH DR		2.000	Ha	22.000.000	
3	28	03	105	03	Pencegahan dan Pembatasan Kerusakan Hasil Hutan	Jumlah Operasi Pencegahan dan Pembatasan Kerusakan Hasil Hutan	Kab. Halmahera Timur	1	Operasi	15.000.000	DAU, DBH DR		1	Operasi	16.500.000	

OPD : DINAS KEHUTANAN  
UNIT : KPH KEPULAUAN SULA

Kode	Urusan/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator	Lokasi	Rencana Tahun 2024			Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2025		Keterangan
				Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp)	Sumber Dana		Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
3	28				225.000.000				247.500.000	
3	28	01			170.000.000				187.000.000	

3	28	01	101		<b>Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b>	<b>Nilai Evaluasi Kinerja</b>				2.500.000						2.750.000	
3	28	01	101	02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Kab. Kep.Sula	1	Dokumen	2.500.000	DAU, DBH DR		1	Dokumen		2.750.000	
3	28	01	102		<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>	<b>Persentase pelaksanaan administrasi keuangan</b>				2.500.000						2.750.000	
3	28	01	102	05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Kab. Kep.Sula	1	Laporan	2.500.000	DAU, DBH DR		1	Laporan		2.750.000	
3	28	01	106		<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	<b>Persentase Pemenuhan Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>				120.000.000						132.000.000	
3	28	01	106	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Kab. Kep.Sula	1	Paket	20.000.000	DAU, DBH DR		1	Paket		22.000.000	
3	28	01	106	07	Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	Kab. Kep.Sula	1	Paket	15.000.000	DAU, DBH DR		1	Paket		16.500.000	
3	28	01	106	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kab. Kep.Sula	1	Laporan	85.000.000	DAU, DBH DR		1	Laporan		93.500.000	
3	28	01	108		<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>Pesentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>				12.000.000						13.200.000	
3	28	01	108	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Kab. Kep.Sula	1	Laporan	12.000.000	DAU, DBH DR		1	Laporan		13.200.000	
3	28	01	109		<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>Jumlah Bulan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>				33.000.000						36.300.000	
3	28	01	109	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Kab. Kep.Sula	1	Unit	28.000.000	DAU, DBH DR		1	Unit		30.800.000	
3	28	01	109	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Kab. Kep.Sula	4	Unit	5.000.000	DAU, DBH DR		4	Unit		5.500.000	

3	28	03			PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN					55.000.000					60.500.000	
3	28	03	105		Pelaksanaan Perlindungan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi	Jumlah luas pengamanan hutan (illegal logging dan perambahan)				55.000.000					60.500.000	
3	28	03	105	01	Pencegahan dan Pembatasan Kerusakan Hutan	Luas Hutan yang Dilakukan Patroli Pengamanan Hutan	Kab. Kep.Sula	2.000	Ha	20.000.000	DAU, DBH DR		2.000	Ha	22.000.000	
3	28	03	105	02	Pencegahan dan Pembatasan Kerusakan Kawasan Hutan	Luas Kawasan Hutan yang Dilakukan Patroli Pengamanan Hutan	Kab. Kep.Sula	2.000	Ha	20.000.000	DAU, DBH DR		2.000	Ha	22.000.000	
3	28	03	105	03	Pencegahan dan Pembatasan Kerusakan Hasil Hutan	Jumlah Operasi Pencegahan dan Pembatasan Kerusakan Hasil Hutan	Kab. Kep.Sula	1	Operasi	15.000.000	DAU, DBH DR		1	Operasi	16.500.000	

OPD : DINAS KEHUTANAN  
UNIT : KPH PULAU MOROTAI

Kode	Kode	Kode	Kode	Kode	Kode	Kode	Kode	Rencana Tahun 2024			Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2025		Keterangan		
								Target Capian	Kebutuhan Dana (Rp)	Sumber Dana		Target Capian	Kebutuhan Dana (Rp)			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)						
3	28				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEHUTANAN					265.000.000				275.000.000		
3	28	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI					215.000.000				236.500.000		
3	28	01	106		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Administrasi Umum Perangkat Daerah				148.360.000				163.196.000		
3	28	01	106	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Pulau Morotai	1	Paket	15.000.000	DAU, DBH DR		1	Paket	16.500.000	
3	28	01	106	07	Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	Pulau Morotai	1	Paket	20.000.000	DAU, DBH DR		1	Paket	22.000.000	
3	28	01	106	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Tidore Kepulauan dan Luar Provinsi Maluku Utara	1	Laporan	113.360.000	DAU, DBH DR		1	Laporan	124.696.000	

3	28	01	108		<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>Pesentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>				15.600.000					17.160.000	
3	28	01	108	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Pulau Morotai	1	Laporan	15.600.000	DAU, DBH DR		1	Laporan	17.160.000	
3	28	01	109		<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>Jumlah Bulan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>				51.040.000					56.144.000	
3	28	01	109	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Pulau Morotai	1	Unit	35.740.000	DAU, DBH DR		1	Unit	39.314.000	
3	28	01	109	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Pulau Morotai	1	Unit	15.300.000	DAU, DBH DR		1	Unit	16.830.000	
3	28	03			<b>PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN</b>					50.000.000					38.500.000	Data Lahan Kritis
3	28	03	105		<b>Pelaksanaan Perlindungan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi</b>	<b>Jumlah luas pengamanan hutan (illegal logging dan perambahan)</b>				50.000.000					38.500.000	
3	28	03	105	01	Pencegahan dan Pembatasan Kerusakan Hutan	Luas Hutan yang Dilakukan Patroli Pengamanan Hutan	Lokasinya tersebar di 5 (lima) kecamatan, Kec. Morotai Sealatan, Kec. Morotai Selatan Barat, Kec. Morotai Timur, Kec. Morotai Utara, dan Kec. Morotai Jaya	2.000	Ha	15.000.000	DAU, DBH DR		2.000	Ha	16.500.000	
3	28	03	105	02	Pencegahan dan Pembatasan Kerusakan Kawasan Hutan	Luas Kawasan Hutan yang Dilakukan Patroli Pengamanan Hutan	Lokasinya tersebar di 5 (lima) kecamatan, Kec. Morotai Sealatan, Kec. Morotai Selatan Barat, Kec. Morotai Timur, Kec. Morotai Utara, dan Kec. Morotai Jaya	1.500	Ha	15.000.000	DAU, DBH DR		1.500	Ha	16.500.000	

3	28	03	105	03	Pencegahan dan Pembatasan Kerusakan Hasil Hutan	Jumlah Operasi Pencegahan dan Pembatasan Kerusakan Hasil Hutan	Lokasinya tersebar di 5 (lima) kecamatan, Kec. Morotai Sealatan, Kec. Morotai Selatan Barat, Kec. Morotai Timur, Kec. Morotai Utara, dan Kec. Morotai Jaya	1	Operasi	20.000.000	DAU, DBH DR		1	Operasi	22.000.000	
---	----	----	-----	----	---	--	--	---	---------	------------	-------------	--	---	---------	------------	--

OPD : DINAS KEHUTANAN  
UNIT : KPH PULAU TALIABU

Kode	Urusan/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator	Lokasi	Rencana Tahun 2024			Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2025		Keterangan						
				Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp)	Sumber Dana		Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp)							
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)						
3	28								215.000.000						236.500.000	
3	28	01							140.000.000						154.000.000	
3	28	01	106						95.500.000						105.050.000	
3	28	01	106	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Pulau Taliabu	1	Unit	10.000.000	DAU, DBH DR		1	Paket	11.000.000	
3	28	01	106	07	Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	Pulau Taliabu	1	Paket	15.000.000	DAU, DBH DR		1	Paket	16.500.000	
3	28	01	106	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Pulau Taliabu	1	Laporan	70.500.000	DAU, DBH DR		1	Laporan	77.550.000	
3	28	01	108		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Pesentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				9.000.000					9.900.000	
3	28	01	108	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Pulau Taliabu	1	Laporan	9.000.000	DAU, DBH DR		1	Laporan	9.900.000	



## **BAB V**

### **PENUTUP**

Dengan telah tersusunnya Rencana Kerja Dinas Kehutanan Provinsi Maluku Utara untuk Tahun 2024 ini maka dapat diketahui secara jelas apa yang menjadi rencana kerja dan program kegiatan yang akan dilaksanakan oleh Dinas Kehutanan selama satu tahun kedepan (tahun 2024) setelah adanya anggaran kegiatan. Renja ini juga sebagai acuan dalam penyusunan Rencana Kegiatan dan Anggaran (RKA) Dinas Kehutanan. Selain itu, Renja juga berfungsi untuk melihat kembali hasil capaian kinerja Perangkat Daerah di tahun sebelumnya (2022) dan progres pada tahun pelaksanaan (tahun 2023).

Untuk menjamin keberhasilan implementasi Renja ini, maka perlu dilakukan hal-hal seperti berikut ini:

1. Menetapkan status hukum naskah perencanaan ini, sehingga implementasinya bersifat mengikat dan konsekuensinya dapat dipertanggungjawabkan;
2. Melakukan sosialisasi Rencana Kerja ke berbagai pihak yang terlibat secara intensif dan berkelanjutan untuk meningkatkan komitmen dan motivasi seluruh pihak untuk melaksanakan rencana kerja yang telah dibuat. Hal ini penting untuk meningkatkan rasa tanggungjawab terhadap pencapaian sasaran dan target yang telah ditetapkan;
3. Pelaksanaan program dan kegiatan yang telah dirumuskan memerlukan dukungan dan kolaborasi dari berbagai pihak baik pelaksana kegiatan, kementerian yang berkaitan dengan Dinas Kehutanan, pemerintah provinsi, lembaga swadaya masyarakat, dan pihak lainnya untuk dapat berkerja secara maksimal agar implementasi pelaksanaan kegiatan dapat berjalan optimal;
4. Pengevaluasian hasil pencapaian sasaran dan target secara rutin untuk mengetahui kinerja dari pelaksana kegiatan. Kegiatan evaluasi ini juga bertujuan mensinkronisasikan berbagai kegiatan untuk menilai tolak ukur antara perencanaan dan pelaksanaan. Hasil dari evaluasi ini bisa berupa penyesuaian terhadap Renja untuk pencapaian Visi dan Misi Organisasi;
5. Untuk menjamin konsistensi, sinergitas, harmonisasi, integrasi, efektivitas dan efisiensi pelaksanaan pembangunan, Sekretariat, setiap Bidang dan di KPH lingkungan Dinas Kehutanan wajib bertanggung jawab pada pelaksanaan Renja Tahun 2024, sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing dan melakukan koreksi

6. yang diperlukan serta melaporkan hasilnya secara berkala setiap triwulan bulan berjalan kepada Kepala Dinas melalui Sub Bagian Program dan Perencanaan Dinas Kehutanan;
7. Secara proaktif, Sub Bagian Program dan Perencanaan Dinas Kehutanan, wajib melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan Program dan Kegiatan Dinas Kehutanan Tahun 2024 serta menghimpun dan menganalisis laporan evaluasi Renja triwulan bulan berjalan dan melaporkan hasil evaluasi Renja kepada Kepala Dinas. Kegiatan monev ini juga bertujuan mensinkronisasikan berbagai kegiatan untuk menilai tolak ukur antara perencanaan dan pelaksanaan.

Semoga Rencana Kerja TA 2024 ini dapat diwujudkan bersama, untuk mencapai tujuan yaitu mempertahankan tutupan hutan dan lahan provinsi maluku utara dan untuk mensukseskan pembangunan Gubernur dan Wakil Gubernur terpilih Periode 2020-2024 melalui Program dan Kegiatan Dinas Kehutanan yang telah ditetapkan.

**Ditetapkan di : Sofifi**  
**Tanggal : 16 November 2023**

**KEPALA DINAS KEHUTANAN  
PROVINSI MALUKU UTARA,**



**H. M. Sukir Lila, S.Hut., M.Si**  
**Pembina Muda**  
**NIP. 19690505 200112 1 005**